



2023

RANWAL RENJA

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jl. Robert Wolter Mongisidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75511

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga Sekretariat DPRD Tahun 2021 dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis didalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini akan dapat dijadikan sebagai dasar acuan Rencana Kerja Tahun 2023 dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja mengacu kepada kebijakan Perangkat Daerah dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2023 upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, transparan dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat atau anggota DPRD Kutai Kartanegara.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disusun ini disadari masih belum

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disusun ini disadari masih belum sempurna terutama untuk menjawab berbagai permasalahan aktual yang akan terjadi kedepan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat diperlukan berbagai kajian yang mendalam dengan sumbangan pemikiran masukan dan saran dari semua pihak, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat berjalan dengan baik dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat didalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhirnya atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan RahmatNya kepada kita sekalian.

Tenggarong, Maret 2022

**Sekretaris,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara**



H.M. Ridha Darmawan, SP., MP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	 12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	37
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.....	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 49
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	51
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 53
4.1 Program dan Kegiatan	53
 BAB V PENUTUP	 70
5.1 Catatan Penting	70
5.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	70
5.3 Rencana Tindak Lanjut	72

BAB. I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang – undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode I (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintah dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui lembaga perwakilan, lembaga politik dan lembaga informal masyarakat karena pada intinya negara demokratis menyebutkan bahwa demokrasi pada arus lokal cukup memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan demokrasi pada tingkat nasional Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan antarsektor mencakup

berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif daerah dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada pelaksanaan pembangunan RPJMD 2016-2021.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan secara teknis operasional yang bertugas memberikan pelayanan kepada DPRD dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Kepala Bagian Umum, membawahkan :
 - Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - Sub bagian Rumah Tangga;
 - Sub bagian Perlengkapan
- c. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan :
 - Sub bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - Sub bagian Verifikasi;
 - Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan
- d. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan :
 - Sub bagian Fasilitas Penganggaran;
 - Sub bagian Fasilitas Pengawasan;
 - Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi
- e. Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan membawahkan :
 - Sub bagian Persidangan dan Risalah;
 - Sub bagian Perundang-Undangan;
 - Sub bagian Humas, Protokol dan Publikasi
- f. Jabatan Fungsional.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengorganisasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretaris Dewan mempunyai tugas:

- Membantu Kepala Daerah secara administrasi sesuai dengan Bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;
- Membantu dan bertanggung jawab secara operasional terhadap pimpinan DPRD;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi pelayanan secara operasional terhadap DPRD;
- Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan mengawasi kegiatan bawahannya;
- Mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan urusan Sekretariat DPRD;
- Merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis di Bagian Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut Bidang tugasnya;
- Merumuskan kegiatan sekretariat DPRD yang meliputi Bagian Tata Usaha, Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Merumuskan sasaran penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD;
- Mengorganisasikan penyusunan RENJA Tahunan Sekretariat DPRD;

- Mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Sekretariat, melaporkan kepada kepala Daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke bagian Administrasi Organisasi;
- Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengkoordinasikan penyusunan program Sekretariat DPRD dengan memberikan arahan kepada kepala bagian mengacu pada RPJPD,
- RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
- Merumuskan rencana strategis kebijakan operasional Sekretariat DPRD;
- Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mendokumentasikan kegiatan DPRD;
- Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis kebijakan operasional Sekretariat DPRD;
- Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD;

Rencana Kerja OPD merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan. dalam 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai langkah awal, kegiatan melalui penetapan indikator kinerja Rencana Kerja OPD merupakan salah satu evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencanakerja tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

- Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
 10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai tindak lanjut guna mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada dasarnya kewenangan daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Menyadari bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Undang – undang

Nomor 17 Tahun 2003, namun demikian dengan merujuk Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Junco PP Nomor 24 Tahun 2004 junco PP Nomor 58 Tahun 2005, maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan menjadi kewajiban setiap Institusi dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya setiap tahun anggaran.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dasar dalam realisasi program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahani dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunangaris besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2/2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024), mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan Realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan realisasi APBD untuk Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara. Pokok-pokok materi yang disajikan bab ini :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan.
5. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program RenstraPD.
6. Kebijakan atau tidaknya perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatsi faktor-faktor penyebab tersebut.
7. Tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pencapaian Renstra PD Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pada bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan PD
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraantugas dan fungsi PD
3. Dampaknya terhadap capaian program nasional
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang Strategis dalam program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses membandingkan antara rancangan Awal RKPD/Renstra PD (tahun 2022).
2. Penjelasan mengenai proses
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD.
4. Melampirkan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD. Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

perangkat daerah;

3. Tabel T-C.32 mengenai usulan program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PROGRAM KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana akhir RKPD / Renstra baik jenis program /Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan Membahas Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya dan capaian indikator kinerja penilaian pencapaian target
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana kerja suatu OPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis OPD tersebut. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja adalah suatu gambaran yang disampaikan melalui hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja tercapainya evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu maksud yaitu (tahun n- 2/2021) dan pelaksanaan capaian tahun 2020 dalam tabel yang dimaksud (tahun n-1/2024) yang mengacu pada APBD tahun 2022 berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan kepada hasil input dan output Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pencapaian target Renstra, berdasarkan hasil rencana kerja OPD tahun 2021 dengan review hasil pelaksanaan Renja OPD tahun 2021 dan realisasi Renstra OPD 2021-2026 yang dicapai dengan evaluasi yang mengacu pada realisasi APBD.

Realisasi dan rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra akan disajikan dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD S/d Tahun 2021
Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat DPRD

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja-Pd tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja - PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	800 Surat Keluar	250 Surat						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	48 rekening	48 rekening						
	Pengelolaan Administrasi Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	7 Kegiatan						
	Seleksi Penerimaan Tenaga Ahli / Tim Ahli	Jumlah Orang	11 Orang	11Orang						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah M2	12 Rekening	12 Rekening						

					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Buah	4028 Buah	5155 Buah						
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Exemplar	42588 Exemplar	28392 Exemplar						
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Item	9504 Porsi	6470 Porsi						
					Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Orang	1716 Orang/Bulan	1716 Orang/Bulan						
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	507450 Lembar/Jenis	188513 Lembar/Jenis						
					Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Orang	218 Orang / Hari	141 Orang / Hari						
					Pamdal Sekretariat DPRD	Jumlah Orang	20 Orang	20 Orang						
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga pimpinan DPRD	Jumlah Orang	4 Buah	28 Buah						
					Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari Tertentu	Jumlah Even	5 Event	5 Event						
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Item	1740 Item	675 Item						
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Item	308 Paket/jenis	310 Paket/jenis						
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Unit	4 Unit	110 Unit						
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit	10 Unit	10 Unit						

					Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit	47 Unit	19 Unit						
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah Unit	100 Unit	265 unit						
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	<u>Jumlah Unit</u>	595 Unit	310 Unit						
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	Jumlah Unit	47 Unit	47 Unit						
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Jumlah Unit	8 Unit	12 Unit						
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Jumlah Pasang	861 steell	497 Steell						
					Pengadaan Pakaian Dinas Olahraga Humas Protokol DPRD	Jumlah Pasang	30 Steell	102 steell						
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur									
					Bimbingan Teknis Pokok - Pokok Kebijakan Serta Prosedur Teknis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Orang	20 Orang	1 Orang						
					Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur	Jumlah Orang	108 Orang	51 Orang						

						Fasilitasi Tim Bekias	Jumlah Inovasi	15 Inovasi	15 Inovasi						
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan									
						Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta monev	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen						
						Penilaian layanan sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen						
						Fasilitasi Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Dokumen	85 Dokumen	85 Dokumen						
						Kordinasi & Konsultasi Perpajakan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen						
						Penyusunan Laporan Keuangan Semester & Tahunan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
						Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2020	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen						
						Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS, APBD dan APBD-P	Jumlah Laporan	3 Laporan	2 Laporan						
						Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan Kinerja Kegiatan	1 Laporan Kinerja Kegiatan						
						Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan BMD	1 Laporan BMD						
						Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D	Jumlah Kegiatan	5 Laporan	4 Laporan						

						Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara	Jumlah system website	9 Kali	9 Kali						
						Fasilitasi Penjangkaran Aspirasi	Jumlah Kecamatan	3 Kali	3 Kali						
						fasilitasi pelayanan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah kali kunjungan	35 Kegiatan	37 kegiatan						
						Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
						Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Jumlah Kali	250 Hearing/dialog	226 Hearing/dialog						
						Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Kali	240 Rapat	203 Rapat						
						Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Kali	75 Rapat	75 Rapat						
						Penyediaan Tenaga Ahli, Tim Ahli dan Nara Sumber Set DPRD Kab. Kukar	Jumlah Orang	27 Orang	27 Orang						
						Reses Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan	3 Reses	4 Reses						
						Rapat Rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi I	Jumlah Kali	85 Rapat dan Kunjungan Kerja	85 Rapat dan Kunjungan Kerja						
						Rapat Rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi II	Jumlah Kali	27 Rapat dan Kunjungan Kerja	66 Rapat dan Kunjungan kerja						
						Rapat Rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi III	Jumlah Kali	35 Rapat dan Kunjungan Kerja	52 Rapat dan Kunjungan Kerja						

					Rapat Rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi IV	Jumlah Kali	35 Rapat dan Kunjungan Kerja	134 Rapat dan Kunjungan Kerja						
					Rapat Rapat dan kunjungan kerja Bagi Pimpinan	Jumlah Kali	12 Laporan	49 Laporan						
					Fasilitasi Pengawasan DPRD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
					Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi DPRD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
					Penegakan Kode Etik DPRD	Jumlah Kali	4 Kali	4 Kali						
					Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen						
					Rapat Rapat kerja BK	Jumlah Rapat	12 Rapat	12 Rapat						
					Rapat Rapat Kerja Bapemperda	Jumlah Rapat	10 Rapat	25 Rapat						
					Rapat Rapat Kerja Banmus	Jumlah Rapat	10 Rapat	1 Rapat						
					Rapat Kerja Banggar	Jumlah Rapat	8 Rapat	12 Rapat						
					Uji Publik Raperda dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda	4 Raperda	4 Raperda						
					Peningkatan Kapasita Anggota DPRD	Jumlah Orang	45 Orang	125 Orang						
					Penyusunan Naskah akdemis raperda prakarsa DPRD dan produk hukum daerah	Jumlah Naskah	4 Naskah Akademis	4 Naskah Akademis						
					Penyebaran informasi kegiatan DPRD pada media massa	Jumlah Media Massa	8 media massa dan elektronik	26 Media massa dan Elektronik						

						Kajian Kebijakan Publik Pansus DPRD dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda	24 Raperda Menjadi Perda	8 raperda Menjadi perda						
						Rapat Koordinasi FKPD dan masyarakat	Jumlah Rapat	2 Kali	18 Kali						
4	02	01	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		85 (A)			72,53 (2020)	100%			100%
4	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60			12	100%			100%
4	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10		2 Dokumen	2	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10		1 Dokumen	2	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5		2 Dokumen	1	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

4	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10		1 Dokumen	2	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5		2 Dokumen	1	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10		2 Dokumen	2	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	02	01	2	01	'07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10		2 Dokumen	2	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		30			6	100%			100%
4	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10,680		12 Bulan	12	100%	2136 Orang/	2136 Orang/	100%

4	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10		2 Dokumen	2	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
4	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60		6 Dokumen	6	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	02	01	2	02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5		6 Dokumen	6	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	02	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10		6 Dokumen	6	100%	2 Kali	2 Kali	100%
4	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90		12 Dokumen	12	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%

4	02	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5			1	100%			100%
4	02	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5		1 Dokumen	1	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20			4	100%			100%
4	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1,555		305 Stel	305	100%	311 Unit	311 Unit	100%
4	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250		108 Orang	108	100%	50 Orang	50 Orang	100%
4	02	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85		15 Inovasi	15	100%	17 Orang	17 Orang	100%
4	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100		20 Orang	20	100%	20 Orang	20 Orang	100%
4	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		30			6	100%			100%

4	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20,140		4028 Buah	4,028	100%	4028 Jenis	4028 Jenis	100%
4	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47,520		9504 porsi/kale	9,504	100%	9504 Porsi	9504 Porsi	100%
4	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15,900		3180 Lembar	3,180	100%	3180 Lembar	3180 Lembar	100%
4	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	191,760		38352 Eksempl	38,352	100%	38352 Eksem	38352 Eksem	100%
4	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,090		218 Orang/Hari	218	100%	218 Orang/K	218 Orang/K	100%
4	02	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35		2 Kegiatan	2	100%	7 Berkas	7 Berkas	100%
4	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6,945			1,389	100%			100%

4	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,540		308 Jenis	308	100%	308 Unit	308 Unit	100%
4	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5,405		1081 Unit	1,081	100%	1081 Unit	1081 Unit	100%
4	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60			12	100%			100%
4	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60		800 Surat	800	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		48 Rekening	48	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60		384 Orang/ Bulan 480 Orang/ Bulan 1476 Orang/ Bulan	2340	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,920			793	100%			100%

4	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	235		47 Unit	47	100%	47 Unit		100%
4	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	235		47 Unit	47	100%	47 Unit	47 Unit	100%
4	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50		4 Unit 100 Unit	104	100%	144 Kali 10 Unit	144 Kali 10 Unit	100%
4	02	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	750		595 Set/Unit	595	100%	240 Kali 150 Unit	240 Kali 150 Unit	100%
4	02	01	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		10			2	100%			100%
4	02	01	2	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	2,700		12 Bulan	12	100%	540 Orang/B	540 Orang/B	100%

4	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2,600		135 Stel 385 Stel	520	100%	520 Stel	520 Stel	100%
						Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	225			0	100%			100%
4	02	01	2	16		Layanan Administrasi DPRD		15			3	100%			100%
4	02	01	2	16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5		2 Kegiatan	2	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
4	02	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1,745		24 Rapat 75 Rapat 250 Rapat	349	100%	349 Rapat	349 Rapat	100%
4	02	01	2	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	20		4 Rumah Tangga	4	100%	4 Rumah Tangga	4 Rumah Tangga	100%
4	02	02	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%			100%	100%			100%
4	02	02	2	01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		80			25	100%			100%

4	02	02	2	01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50		10 Rapat	10	100%	10 Rapat	10 Rapat	100%
4	02	02	2	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	120		24 Raperda	24	100%	24 Raperda	24 Raperda	100%
4	02	02	2	01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	120		1 Raperda	1	100%	24 Raperda	24 Raperda	100%
4	02	02	2	01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	40		4 Dokumen	4	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
4	02	02	2	01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1			0	100%			100%
4	02	02	2	02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		90			8	100%			100%
4	02	02	2	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	25		2 Dokumen	2	100%	5 Rapat	5 Rapat	100%

4	02	02	2	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25		2 Dokumen	2	100%	5 Rapat	5 Rapat	100%
4	02	02	2	02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	10		1 Dokumen	1	100%	2 Rapat	2 Rapat	100%
4	02	02	2	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	10		1 Dokumen	1	100%	2 Rapat	2 Rapat	100%
4	02	02	2	02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	10		1 Dokumen	1	100%	2 Rapat	2 Rapat	100%
4	02	02	2	02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10		1 Dokumen	1	100%	2 Rapat	2 Rapat	100%
4	02	02	2	03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		950			254	100%			100%
4	02	02	2	03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	180		1 Dokumen 36 Layanan	36	100%	36 Pengaw s	36 Pengawa s	100%

4	02	02	2	03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	180		1 Dokumen 36 Layanan	36	100%	36 Pengawa s	36 Pengawa s	100%
4	02	02	2	03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	180		1 Dokumen 36 Layanan	36	100%	36 Pengawa s	36 Pengawa s	100%
4	02	02	2	03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	180		1 Dokumen 36 Layanan	36	100%	36 Pengawa s	36 Pengawa s	100%
4	02	02	2	03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	180		1 Dokumen 36 Layanan	36	100%	36 Pengawa s	36 Pengawa s	100%
4	02	02	2	03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20		1 Dokumen 36 Layanan	36	100%	4 Pengawa sa	4 Pengawa sa	100%

4	02	02	2	03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	20		1 Dokumen 36 Layanan	36	100%	4 Pengawasa	4 Pengawasa	100%
4	02	02	2	03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10		2 Laporan	2	100%	2 Rapat	2 Rapat	100%
4	02	02	2	04		Peningkatan Kapasitas DPRD		100%			100%	100%			100%
4	02	02	2	04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	45				100%			100%
4	02	02	2	04	02	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	225			0	100%	45 Orang	45 Orang	100%
4	02	02	2	04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	75		8 Berita 1 Kegiatan 2 Kegiatan	8	100%	15 Media	15 Media	100%
4	02	02	2	04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	600		120 Orang 120 Orang/Bulana	120	100%	120 Orang	120 Orang	100%
4	02	02	2	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	35		84 Orang/Bul	84	100%	7 Orang	7 Orang	100%

										an					
4	02	02	2	04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5		1 Kegiatan	1	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
4	02	02	2	04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5		1 Dokumen	1	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	02	02	2	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100%			100%	100%			100%
4	02	02	2	05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	10		4 Rapat	4	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	02	02	2	05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15		3 Reses	3	100%	3 Reses	3 Reses	100%
4	02	02	2	06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100%			100%	100%			100%
4	02	02	2	06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	5			1	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	02	02	2	06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	50			36	100%	10 Pengawas	10 Pengawas	100%
4	02	02	2	08		Fasilitasi Tugas DPRD		100%			100%	100%			100%

4	02	02	2	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	480		12 Laporan 4 Orang/ Hari 288 Rapat/ Kunjungan	288	100%	96 Koordinasi	96 Koordinasi	100%
4	02	02	2	08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	70		10 Rapat	10	100%	14 Rapat	14 Rapat	100%
4	02	02	2	08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	480		1 Kegiatan	1	100%	96 Rapat	96 Rapat	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektivitas kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mencapai tujuan, visi dan misi daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Mengingat Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mewujudkan pelayanan prima dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan Misi yang ditetapkan adalah membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kegiatan rapat-rapat Dewan, maka sulit menentukan tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji. Namun demikian kami mencoba menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan berdasarkan target capaian pada tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator *)	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RENSTRA 2026-2021												
<u>1</u>	Persentase Transparansi dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	-	-	<u>93.8</u>	-	-	-	<u>80.3</u>	-	-	-	-
<u>2</u>	Persentase Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	<u>97.4</u>	-	-	-	<u>80.9</u>	-	-	-	-
<u>3</u>	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	-	-	<u>100%</u>	-	-	-	<u>100%</u>	-	-	-	-
<u>4</u>	Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi			100%				100%				

	baik											
<u>5</u>	Persentase tingkat pelanggaran ASN			0				0%				
<u>6</u>	Rata-rata nilai kinerja SKP			87%				87%				
<u>7</u>	Tingkat konsistensi renstra dan renja			100%				100%				
<u>8</u>	Ketepatan waktu pelaporan keuangan dan aset			100%				100%				
<u>9</u>	persentase tindak lanjut temuan audit			100%				100%				
<u>10</u>	Persentase rapat-rapat dewan			80%				80%				
<u>11</u>	persentase rapenda yang di tetapkan menjadi perda			73%				73%				
<u>12</u>	persentase fasilitasi protokoler dan Humas DPRD			100%				100%				
<u>13</u>	Persentase fasilitasi keluhan / pengaduan masyarakat			81%				81%				
RENSTRA 2021-2026												
<u>14</u>	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Fasilitasi kegiatan DPRD				70 (B)	70 (B)	73 (B)		70 (B)	70 (B)	73 (B)	
<u>15</u>	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
<u>16</u>	Nilai SAKIP				77 (BB)	79 (BB)	81 (A)		77 (BB)	79 (BB)	81 (A)	
<u>17</u>	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12	12	12		12	12	12	
<u>18</u>	Jumlah laporan Administrasi Keuangan				6	6	6		6	6	6	

	Perangkat Daerah yang akuntabel											
19	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah				1	1	1		1	1	1	
20	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian				4	4	4		4	4	4	
21	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				6	6	6		6	6	6	
22	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1389	1389	1389		1389	1389	1389	
23	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan				12	12	12		12	12	12	
24	Jumlah Barang Milik Daerah				254	254	254		254	254	254	
					384	384	384		384	384	384	
25	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				2	2	2		2	2	2	
26	Jumlah layanan Administrasi DPRD				3	3	3		3	3	3	
27	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Rapat-Rapat Kerja DPRD				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
28	Persentase Fasilitas Pengawasan dan Pembahasan Penganggaran APBD				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
29	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat				16	16	16		16	16	16	
30	Jumlah Rapat Pembahasan				18	18	18		18	18	18	

31	Jumlah Pengawasan DPRD				190	190	190		190	190	190	
32	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
33	Persentase Kegiatan yang terlaksana				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
34	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
35	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD				100%	100%	100%		100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategis dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal, Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud memberikan panduan langkah-langkah kinerja yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan Indikator Kerja Utama pada berbagai tingkatan organisasi.

- Peningkatan peran sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD yang akuntabel.
- Peningkatan sistem, dan prosedur kerja yang efisien, efektif, sinergis dan akuntabel di tunjang sarana dan prasarana yang memadai.

- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
- d. Mendapatkan informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Mendapatkan ukuran keberhasilan dalam capaian suatu tujuan untuk perbaikan kinerja.
- f. Serta keterkaitan antara kebijakan yang dilaksanakan dengan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam rancangan ini perangkat daerah harus menjabarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan sasaran dan indikator dalam RPJMD yang akan diselaraskan dengan RENSTRA dan diturunkan dalam perencanaan tahunan dalam RENJA OPD, kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui didalam pelaksanaan APBD tahun 2022, memang beberapa usulan yang diajukan didalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana awal yang ditetapkan dikarenakan adanya beberapa perubahan-perubahan dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adapun program dan kegiatan masyarakat karena tupoksinya tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Dewan baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 guna mendukung target dan capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP	79 (BB)	74,587,059,139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP	79 (BB)	74,587,059,139	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	1,650,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	1,650,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	250,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	250,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	250,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	250,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	200,000,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	250,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	250,000,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	200,000,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	250,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	250,000,000	

	Kinerja SKPD					Kinerja SKPD					
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	250,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	250,000,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6	20,676,470,758	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6	20,676,470,758	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	2,136	19,419,724,758	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	2,136	19,419,724,758	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	117,240,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	117,240,000	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	12	108,953,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	12	108,953,000	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	45,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	45,500,000	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2	126,425,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2	126,425,000	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semester an SKPD	18	858,628,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semester an SKPD	18	858,628,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	254,250,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	254,250,000	

14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	254,250,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	254,250,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4	1,436,065,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4	1,436,065,000	
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	311	500,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	311	500,000,000	
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	336,065,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	336,065,000	
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17	250,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17	250,000,000	
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	350,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	350,000,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	2,758,211,994	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	2,758,211,994	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4,028	715,965,994	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4,028	715,965,994	
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9,504	1,010,422,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9,504	1,010,422,000	
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3,180	415,924,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3,180	415,924,000	

22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang- undangan dan Advetorial yang disediakan	38,352	160,900,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang- undangan dan Advetorial yang disediakan	38,352	160,900,000	
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	218	318,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	218	318,500,000	
24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	7	136,500,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	7	136,500,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,389	1,500,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,389	1,500,000,000	
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	308	700,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	308	700,000,000	
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,081	800,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,081	800,000,000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	8,453,870,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	8,453,870,000	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah surat menyurat	12	3,870,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah surat menyurat	12	3,870,000	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	2,500,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	2,500,000,000	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	1.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	5,950,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	1.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	5,950,000,000	

		Kab. Kutai Kartanegara	2.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12			Kab. Kutai Kartanegara	2.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	254	1,802,553,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	254	1,802,553,000	
		Kab. Kutai Kartanegara		384			Kab. Kutai Kartanegara		384		
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	47	311,048,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	47	311,048,000	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	47	311,505,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	47	311,505,000	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	800,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	800,000,000	
		Kab. Kutai Kartanegara		144			Kab. Kutai Kartanegara		144		
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	150	380,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	150	380,000,000	
		Kab. Kutai Kartanegara		240			Kab. Kutai Kartanegara		240		

9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	2	31,802,468,387	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	2	31,802,468,387	
34	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	540	31,402,018,387	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	540	31,402,018,387	
35	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	520	320,450,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	520	320,450,000	
36	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Medical Check Up	45	80,000,000	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Medical Check Up	45	80,000,000	
10	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi DPRD	3	4,253,170,000	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi DPRD	3	4,253,170,000	
37	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	136,500,000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	136,500,000	
38	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	349	2,973,570,000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	349	2,973,570,000	
39	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4	1,143,100,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4	1,143,100,000	
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Rapat-Rapat Kerja DPRD	100%	30,840,810,000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Rapat-Rapat Kerja DPRD	100%	30,840,810,000	
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Pembahasan Penganggaran APBD	100%			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Pembahasan Penganggaran APBD	100%		
11	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	16	5,411,700,000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	16	5,411,700,000	
40	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	268,750,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	268,750,000	

41	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	24	3,823,500,000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	24	3,823,500,000	
42	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	24	381,650,000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	24	381,650,000	
43	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	8	937,800,000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	8	937,800,000	
44	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	0	0	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	0	0	
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Pembahasan	18	1,050,000,000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Pembahasan	18	1,050,000,000	
45	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	5	375,000,000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	5	375,000,000	
46	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	375,000,000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	375,000,000	
47	Pembahasan APBD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan APBD	2	100,000,000	Pembahasan APBD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan APBD	2	100,000,000	
48	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	2	100,000,000	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	2	100,000,000	
49	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan Laporan Semester	2	50,000,000	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan Laporan Semester	2	50,000,000	
50	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	50,000,000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	50,000,000	
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan DPRD	190	4,322,500,000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan DPRD	190	4,322,500,000	
51	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	36	682,500,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	36	682,500,000	
52	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36	682,500,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36	682,500,000	

53	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36	682,500,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36	682,500,000	
54	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36	682,500,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36	682,500,000	
55	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	36	682,500,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	36	682,500,000	
56	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	364,000,000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	364,000,000	
57	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	364,000,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	364,000,000	
58	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	182,000,000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	182,000,000	
14	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	5,391,260,000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	5,391,260,000	
59	Orientasi DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Orientasi	0		Orientasi DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Orientasi	0		
60	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	45	1,274,750,000	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	45	1,274,750,000	
61	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Media Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15	1,974,210,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Media Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15	1,974,210,000	

62	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120	1,505,300,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120	1,505,300,000	
63	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7	295,750,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7	295,750,000	
64	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	182,000,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	182,000,000	
65	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja DPRD	1	159,250,000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja DPRD	1	159,250,000	
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Kegiatan yang terlaksana	100%	3,683,660,000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Kegiatan yang terlaksana	100%	3,683,660,000	
66	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2	129,485,000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2	129,485,000	
67	Pelaksanaan Reses	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaksanaan Reses	3	3,554,175,000	Pelaksanaan Reses	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaksanaan Reses	3	3,554,175,000	
16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	100%	333,790,000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	100%	333,790,000	
68	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyusunan Kode Etik DPRD	1	136,500,000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyusunan Kode Etik DPRD	1	136,500,000	
69	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	10	197,290,000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	10	197,290,000	
17	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	10,647,900,000	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	10,647,900,000	
70	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koordinasi/Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	96	7,694,800,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koordinasi/Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	96	7,694,800,000	
71	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14	182,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14	182,000,000	
72	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96	2,771,100,000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96	2,771,100,000	
TOTAL					105,427,869,139	TOTAL				105,427,869,139	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil dari musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tenggarong untuk Tahun 2023.

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan Program dan Kepentingan dari Para Pemangku kepentingan yang dituju kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Table T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Jalan perubahan menuju Indonesia Hebat adalah jalan ideologis. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan, pemerintahan kami akan dipandu oleh VISI sebagai berikut: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG Upaya untuk mewujudkan Visi terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong itu akan ditempuh melalui MISI sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara dalam upaya mendukung terwujudnya Visi - Misi Nasional Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara meningkatkan pelayanan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Kabupaten Kutai kartanegara sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka Penyusunan RPJMD 2021-2026, menyampaikan visi-misi ke RPJMD,” Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara, Visi *‘Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia’*.

Sejahtera adalah Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

Berbahagia adalah Kondisi masyarakat Kukar yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi ;

1. Memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efesien dan melayani.
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbassis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah

5. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dengan mengacu kepada visi – Misi RPJMD 2021 – 2026 dengan harapan semua kepala OPD dapat menterjemahkan visi-misi dan program dedikasi ke dalam strategy arah kebijakan dan program prioritas perangkat daerah, serta melibatkan para akademisi dan data-data yang valid dan aktual dan disampaikan secara sistematis dan dilaporkan secara berjenjang.

Visi dan Misi RPJMD yang melekat pada Sekretariat DPRD Merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola untuk mencapai tujuan, bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan serta mengatasi kesenjangan yang terjadi maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai kartanegara dengan Visi Sebagai Berikut “ Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan “ Visi tersebut dimaksud adanya upaya maksimal dari seluruh aparatur untuk lebih propesional didalam pelaksanaan tugas pelayanan dan kelancaran sehingga mampu menjadi institusi yang professional dan berkualitas, sehingga dapat diwujudkan untuk meningkatkan kualitas Birokrasi professional untuk menuju *good governance* dengan Misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan Kualitas Suber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan perkembangan organisasi.
2. Meningkatkan tertib administrasi kesekretariatan yang akuntabel dan transparan.
3. Meningkatkan fasilitasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan dan sasaran adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasai. Tujuan (goals) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasai. Tujuan (goals) adalah pernyataan umum tentang “ke arah mana” suatu organisasi akan berada di masa depan, merupakan penjabaran Misi, Sesuatu (what) yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus; meskipun demikian tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur.

Sasaran (Objectives) bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur). Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terkunci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang bersifat spesifik dan terukur dari tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula. Sehingga dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya acuan sebagai tolak ukur untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai strategis;

Tujuan : Mewujudkan kualitas fasilitasi terhadap Agenda Kegiatan DPRD

Sasaran : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021- 2026, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu : *Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia*’.

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2023 menguraikan target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam tahun anggaran 2023 dalam perumusan program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Renstra.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka diperlukan penyesuaian kegiatan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rencana Kerja tahunan tahun 2023 dan target kegiatan tahun 2023 mengalami perubahan baik dari jumlah

program maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan pada tahun 2023 terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 1 program, 10 Kegiatan dan 39 SubKegiatan.
2. Untuk kegiatan non generik terdiri dari 1 program, 7 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan.
3. Sehingga seluruhnya berjumlah 2 program, 17 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan

Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan Rancangan Renja, untuk menyikapi hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas.
3. Menyesuaikan Dengan Berita Acara Kesepakatan Review Program RPJMD

Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut:

- a. Prosentase Penyelenggara Rapat-Rapat yang Sesuai dengan Jadwal
- b. Jumlah Peraturan Perundangan-undangan yang disahkan
- c. Persentase Anggota DPRD yang puas atas layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun perincian Kegiatan Tahun 2023 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		kab. Kutai Kartanegara	79 (BB)	74,587,059,139	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		9	74,587,059,139
4	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartanegara	12	1,650,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	1,650,000,000
4	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	2	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	250,000,000

4	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartane gara	2	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	250,000,000
4	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kab. Kutai Kartane gara	1	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	200,000,000
4	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	kab. Kutai Kartane gara	2	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	250,000,000
4	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartane gara	1	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	200,000,000
4	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Kutai Kartane gara	2	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	250,000,000
4	02	01	2	01	'07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartane gara	2	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	250,000,000

4	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartane gara	6	20,676,470,758	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6	20,676,470,758
4	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartane gara	2,136	19,419,724,758	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2,136	19,419,724,758
4	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kutai Kartane gara	2	117,240,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	117,240,000
4	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartane gara	12	108,953,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	108,953,000
4	02	01	2	02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartane gara	1	45,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	45,500,000
4	02	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	kab. Kutai Kartane gara	2	126,425,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	126,425,000

4	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	kab. Kutai Kartane gara	18	858,628,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	18	858,628,000
4	02	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartane gara	1	254,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	254,250,000
4	02	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartane gara	1	254,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	254,250,000
4	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartane gara	4	1,436,065,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4	1,436,065,000
4	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	kab. Kutai Kartane gara	311	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	311	500,000,000
4	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	kab. Kutai Kartane gara	50	336,065,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	50	336,065,000

4	02	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartane gara	17	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	17	250,000,000
4	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartane gara	20	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	20	350,000,000
4	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		kab. Kutai Kartane gara	6	2,758,211,994	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6	2,758,211,994
4	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartane gara	4,028	715,965,994	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4,028	715,965,994
4	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartane gara	9,504	1,010,422,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	9,504	1,010,422,000
4	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	kab. Kutai Kartane gara	3,180	415,924,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3,180	415,924,000
4	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	kab. Kutai Kartane gara	38,352	160,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	38,352	160,900,000

4	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kutai Kartane gara	218	318,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	218	318,500,000
4	02	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartane gara	7	136,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	7	136,500,000
4	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		kab. Kutai Kartane gara	1,389	1,500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1,389	1,500,000,000
4	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kutai Kartane gara	308	700,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	308	700,000,000
4	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kutai Kartane gara	1,081	800,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1,081	800,000,000
4	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		kab. Kutai Kartane gara	12	8,453,870,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12	8,453,870,000
4	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Kutai Kartane gara	12	3,870,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12	3,870,000

4	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kab. Kutai Kartane gara	12	2,500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12	2,500,000,000
4	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartane gara	12	5,950,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12	5,950,000,000
									12		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12	
4	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		kab. Kutai Kartane gara	254	1,802,553,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	254	1,802,553,000
4	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kab. Kutai Kartane gara	47	311,048,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	47	311,048,000
4	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kab. Kutai Kartane gara	47	311,505,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	47	311,505,000
4	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab. Kutai Kartane gara	10	800,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	10	800,000,000

4	02	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kab. Kutai Kartane gara	150	380,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	150	380,000,000
4	02	01	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		kab. Kutai Kartane gara	2	31,802,468,387	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	31,802,468,387
4	02	01	2	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	kab. Kutai Kartane gara	540	31,402,018,387	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	540	31,402,018,387
4	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	kab. Kutai Kartane gara	520	320,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	520	320,450,000
						Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	kab. Kutai Kartane gara	45	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	45	80,000,000
4	02	01	2	16		Layanan Administrasi DPRD		kab. Kutai Kartane gara	3	4,253,170,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3	4,253,170,000
4	02	01	2	16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	kab. Kutai Kartane gara	1	136,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	136,500,000

4	02	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartane gara	349	2,973,570,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	349	2,973,570,000
4	02	01	2	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	kab. Kutai Kartane gara	4	1,143,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4	1,143,100,000
4	02	02	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		kab. Kutai Kartane gara	100%	30,840,810,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	30,840,810,000
4	02	02	2	01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		kab. Kutai Kartane gara	16	5,411,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	16	5,411,700,000
4	02	02	2	01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartane gara	10	268,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	10	268,750,000
4	02	02	2	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartane gara	24	3,823,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	24	3,823,500,000
4	02	02	2	01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartane gara	24	381,650,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	24	381,650,000

4	02	02	2	01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	kab. Kutai Kartane gara	8	937,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	8	937,800,000
4	02	02	2	01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	kab. Kutai Kartane gara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0	0
4	02	02	2	02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		kab. Kutai Kartane gara	18	1,050,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	18	1,050,000,000
4	02	02	2	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	kab. Kutai Kartane gara	5	375,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5	375,000,000
4	02	02	2	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartane gara	5	375,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5	375,000,000
4	02	02	2	02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartane gara	2	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	100,000,000
4	02	02	2	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartane gara	2	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	100,000,000

4	02	02	2	02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	kab. Kutai Kartane gara	2	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	50,000,000
4	02	02	2	02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartane gara	2	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	50,000,000
4	02	02	2	03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		kab. Kutai Kartane gara	190	4,322,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	190	4,322,500,000
4	02	02	2	03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartane gara	36	682,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	36	682,500,000
4	02	02	2	03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartane gara	36	682,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	36	682,500,000
4	02	02	2	03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kab. Kutai Kartane gara	36	682,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	36	682,500,000
4	02	02	2	03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartane gara	36	682,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	36	682,500,000

4	02	02	2	03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	kab. Kutai Kartane gara	36	682,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	36	682,500,000
4	02	02	2	03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kab. Kutai Kartane gara	4	364,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4	364,000,000
4	02	02	2	03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartane gara	4	364,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4	364,000,000
4	02	02	2	03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	kab. Kutai Kartane gara	2	182,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	182,000,000
4	02	02	2	04		Peningkatan Kapasitas DPRD		kab. Kutai Kartane gara	100%	5,391,260,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	5,391,260,000
4	02	02	2	04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	kab. Kutai Kartane gara	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0	

4	02	02	2	04	02	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartane gara	45	1,274,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	45	1,274,750,000
4	02	02	2	04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartane gara	15	1,974,210,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	15	1,974,210,000
4	02	02	2	04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	kab. Kutai Kartane gara	120	1,505,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	120	1,505,300,000
4	02	02	2	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartane gara	7	295,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	7	295,750,000
4	02	02	2	04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartane gara	1	182,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	182,000,000
4	02	02	2	04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	kab. Kutai Kartane gara	1	159,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	159,250,000
4	02	02	2	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		kab. Kutai Kartane gara	100%	3,683,660,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	3,683,660,000

4	02	02	2	05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	kab. Kutai Kartanegara	2	129,485,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2	129,485,000
4	02	02	2	05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	kab. Kutai Kartanegara	3	3,554,175,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3	3,554,175,000
4	02	02	2	06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		kab. Kutai Kartanegara	100%	333,790,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	333,790,000
4	02	02	2	06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	136,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1	136,500,000
4	02	02	2	06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	10	197,290,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	10	197,290,000
4	02	02	2	08		Fasilitasi Tugas DPRD		kab. Kutai Kartanegara	100%	10,647,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	10,647,900,000
4	02	02	2	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	96	7,694,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	96	7,694,800,000

4	02	02	2	08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartane gara	14	182,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	14	182,000,000
4	02	02	2	08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartane gara	96	2,771,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	96	2,771,100,000
						TOTAL				105,427,869,139			105,427,869,139

BAB. V

P E N U T U P

5.1. Catatan Penting

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023, yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja (Renja) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.

2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;

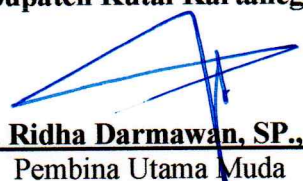
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government and good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan)

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, Maret 2022

**Sekretaris,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara**



H.M. Ridha Darmawan, SP., MP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19701117 199803 1 008